

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perbedaan Besarnya Laba Akuntansi dengan Laba Fiskal

Setiap Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak. Dalam SPT Tahunan tersebut disertakan laporan yang menunjukkan informasi tentang laba yang merupakan obyek pajak. Namun demikian, ada kalanya jumlah laba yang dihasilkan oleh proses akuntansi komersial berbeda dengan laba usaha kena pajak menurut konsep fiskal (pajak). Perbedaan tersebut disebabkan karena laba kena pajak dihitung berdasarkan peraturan Undang-Undang Pajak, sedangkan laba akuntansi komersial didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya pos-pos rekening pendapatan dan biaya yang boleh diakui menurut akuntansi komersial tetapi tidak boleh menurut Undang-undang atau sebaliknya dan pos-pos pendapatan dan biaya yang sudah diakui menurut akuntansi tetapi pajak belum diakui atau sebaliknya.

Perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya tersebut mengakibatkan perbedaan dalam laba menurut konsep akuntansi komersial dan laba menurut pajak. Secara rinci, perbedaan dalam pengakuan pendapatan dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang diakui dalam laba usaha oleh akuntansi komersial, tetapi tidak diakui/atau dihitung sebagai penghasilan dalam laba usaha kena pajak. Jenis penghasilan ini termasuk dalam kelompok penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final. Sebagai contoh misalnya: Penghasilan berupa bunga bank, penghasilan dari hadiah undian, keuntungan dari penjualan penyertaan saham di pasar modal.
- b. Penghasilan yang tidak diakui dalam laba usaha oleh akuntansi komersial, tetapi diakui dalam laba usaha kena pajak. Misalnya, sumbangan/hibah dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, dan penguasaan.

Perbedaan yang disebabkan karena perbedaan dalam hal pengakuan biaya adalah biaya yang diakui sebagai pengurang laba akuntansi komersial, tetapi tidak diakui sebagai pengurang atas laba usaha kena pajak. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah biaya-biaya yang tergolong dalam biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*non deductible expense*), seperti misalnya :

- a. Tunjangan karyawan berupa pemberian fasilitas kendaraan, perumahan, dan sebagainya yang berbentuk natura atau kenikmatan.
- b. Biaya *entertainment* yang tidak dilampiri dengan daftar nominatifnya.
- c. Biaya bunga atas pinjaman kepada Bank, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk memelihara Sertifikat Deposito yang terkena PPh final.
- d. Biaya pemeliharaan kendaraan yang boleh dibawa pulang oleh karyawan.

- e. Biaya perjalanan dinas dalam bentuk "*lump sum*", yang tidak diakui sebagai penghasilan dari karyawan yang bersangkutan.
- f. Biaya sumbangan yang diberikan untuk peringatan hari kemerdekaan di kelurahan atau instansi lainnya.
- g. Biaya berupa denda pajak.
- h. Pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti yang memadai.

Selain perbedaan yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, perbedaan laba juga terjadi karena adanya perbedaan dalam kebijakan akuntansi.

Perbedaan dalam pengakuan penghasilan dan biaya menurut akuntansi komersial dan fiskal serta perbedaan dalam kebijakan akuntansi di atas dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu perbedaan yang bersifat tetap/permanen dan perbedaan yang bersifat sementara/waktu.

2.2 Perbedaan Tetap

Perbedaan tetap merupakan transaksi-transaksi pendapatan dan biaya tertentu yang boleh diakui akuntansi tetapi tidak boleh diakui oleh pajak (peraturan pajak) atau sebaliknya. Selisih laba usaha kena pajak menurut akuntansi dan ketentuan perpajakan seperti disebutkan di muka, salah satunya bersifat permanen atau tidak pernah terkompensasikan. Termasuk dalam kategori perbedaan permanen ini adalah: (1) item-item atau transaksi yang pengaruhnya ikut diperhitungkan dalam penentuan laba akuntansi tetapi tidak demikian halnya untuk perpajakan, (2) item-item atau transaksi yang

pengaruhnya ikut diperhitungkan dalam penentuan laba kena pajak tetapi tidak demikian halnya untuk penentuan laba akuntansi. Elemen-elemen berikut ini merupakan pos-pos yang membedakan antara akuntansi dan fiskal yang termasuk dalam kategori perbedaan tetap (permanen): (1) penghasilan bunga dari bank; (2) penghasilan dividen; (3) penghasilan dari hadiah undian; (4) keuntungan dari penjualan penyertaan saham di Bursa Efek; (5) penghasilan berupa sumbangan/hibah dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan dan penguasaan; (6) biaya sumbangan/bantuan; (7) tunjangan karyawan berupa pemberian fasilitas kendaraan, perumahan, dan sebagainya atau kenikmatan dalam bentuk natura; (8) PPh pasal 26 atas royalti yang ditanggung oleh pemberi hasil; (9) biaya representasi/jamuan yang tidak ada daftar nominatifnya; (10) biaya denda dan bunga pajak; dan (11) hibah/warisan.

Berikut ini diuraikan beberapa pos yang membedakan laba usaha kena pajak menurut konsep akuntansi dan fiskal yang termasuk dalam perbedaan tetap:

2.2.1 Penghasilan Bunga Bank

Salah satu unsur penghasilan diluar usaha dalam laporan rugi laba adalah pendapatan bunga deposito bank. Pada akhir periode akuntansi menurut akuntansi harus disajikan dalam laporan perhitungan rugi/laba pada pos rekening pendapatan di luar usaha. Sedangkan menurut Undang-undang pajak berdasar perlakuan penghasilan bunga bank sebagai berikut: *"Atas penghasilan berupa bunga yang berasal dari*

deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia dipotong pajak penghasilan yang bersifat final”.

Atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan dikenakan pajak penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dan bersifat final. Deposito berjangka dan sertifikat deposito adalah deposito berjangka dalam rupiah maupun valuta asing pada bank dan sertifikat deposito yang diterbitkan oleh Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank di Indonesia yang jangka waktunya 30 hari sampai dengan 24 bulan. Sedangkan yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara tabungan. Dari uraian penghasilan bunga deposito di atas, dapat disimpulkan menurut pajak penghasilan bunga deposito tidak dimasukkan dalam salah satu unsur penghitungan rugi laba, karena atas penghasilan bunga deposito telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Pemotongan pajak bersifat final mengandung arti bahwa atas penghasilan deposito bank tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lainnya dalam menghitung laba usaha kena pajak dan atas penghasilan yang sudah dipotong terhadap penghasilan deposito bank tidak boleh dikreditkan dengan pajak yang terutang. Sebagai contoh, PT. “Harun” memperoleh penghasilan kena pajak menurut akuntansi sebesar Rp. 10.000.000,- jumlah tersebut sudah termasuk penghasilan bunga deposito bank sebesar Rp. 500.000,-. Maka penghasilan kena pajak

menurut peraturan perpajakan hanya sebesar Rp 9.500.000,-, jumlah penghasilan deposito bank sebesar Rp 500.000,- tidak digabungkan dengan penghasilan yang dikenakan pajak karena telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final.

2.2.2 Penghasilan Dividen

Untuk mengoptimalkan penggunaan dana, dana yang tak terpakai menganggur (*idle fund*) pimpinan perusahaan biasanya mempunyai kebijaksanaan untuk menginvestasikan dana yang ada dalam bentuk saham atau obligasi. Atas pembelian saham, perusahaan akan memperoleh penghasilan berupa dividen. Menurut akuntansi komersial, penghasilan dividen merupakan bagian dari penghasilan pada akhir periode harus disajikan dalam laporan rugi/laba. Sedangkan menurut Undang-undang Pajak penghasilan dividen termasuk dalam pengecualian objek pajak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa *“dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat (1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan (2) bagi perseroan terbatas Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua*

puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut”.

Berdasarkan ketentuan di atas, dividen yang dananya berasal dari laba setelah dikurangi dengan pajak dan diterima oleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dari penyertaannya pada badan usaha lainnya yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan penyertaan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen), dan penerima dividen tersebut tidak termasuk Obyek Pajak.

2.2.3 Biaya Sumbangan Termasuk Zakat yang Diterima Oleh Badan Amil Zakat yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah, Biaya dalam Bentuk Natura, Denda, dan Bunga Pajak

Standar akuntansi keuangan menganut prinsip bahwa semua biaya dapat dibebankan atau dikurangkan dari penghasilan yang diperoleh perusahaan dalam periode akuntansi tertentu. Jadi biaya sumbangan, biaya dalam bentuk natura, denda dan bunga pajak menurut Standar Akuntansi Keuangan merupakan arus kas keluar yang setiap periode harus dibebankan pada penghasilan.

Sedangkan menurut peraturan perpajakan tidak semua biaya dikeluarkan oleh perusahaan bisa dibebankan pada penghasilan dalam periode tertentu. Biaya-biaya tersebut akan diuraikan berikut ini secara lebih terinci :

a. *Biaya sumbangan*

Dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan : harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b yakni :

a) (1) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak diperlakukan sama.

(2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial dan pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

b) *Warisan*

Berdasarkan ketentuan tersebut, bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan merupakan objek pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh

Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak diperlakukan sama seperti bantuan atau sumbangan.

Hubungan usaha antara pihak yang memberi dan yang menerima dapat terjadi, misalnya PT. ABC sebagai produsen suatu jenis barang yang bahan baku utamanya diproduksi oleh PT. MBA. Apabila PT. MBA memberikan sumbangan bahan baku kepada PT. ABC, maka sumbangan bahan baku yang diterima oleh PT. ABC merupakan objek pajak.

b. *Biaya dalam bentuk natura*

Penghasilan kena pajak yang diperhitungkan dalam suatu periode tidak boleh membebankan biaya-biaya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang menyatakan "*penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.*"

Penggantian atau imbalan yang sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam pajak adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kesejahteraan karyawan dalam bentuk barang atau pelayanan.

Penggantian atau imbalan ini bagi perusahaan bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak.

c. *Denda dan Bunga Pajak*

Menurut peraturan perpajakan terhadap denda dan bunga pajak tidak boleh dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak seperti disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 “*sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan*”.

Dengan demikian menurut ketentuan akuntansi sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan dapat dibebankan sebagai biaya, dalam periode akuntansi tertentu, sedangkan menurut ketentuan pajak tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*non deductible expense*). Oleh karena itu, untuk kepentingan penghitungan laba usaha kena pajak, perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal untuk mengurangi jumlah biaya yang tidak boleh dikurangkan ini.

2.2.4 Biaya Entertainment

Biaya *entertainment* merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*) sepanjang ada hubungan dengan kegiatan Wajib Pajak dan dibuatkan daftar nominatifnya. Dengan demikian biaya *entertainment* yang tidak dilengkapi dengan daftar

nominatifnya merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan.

2.3 Perbedaan Sementara/Waktu

Adakalanya perbedaan antara akuntansi dan fiskal (pajak) terjadi karena perbedaan waktu dan bersifat sementara. Dengan kata lain, jika terjadi perbedaan, perbedaan setelah dilakukan rekonsiliasi tersebut akan diperhitungkan dengan laba usaha kena pajak periode berikutnya. Termasuk dalam elemen-elemen perbedaan sementara (waktu) ini adalah: (1) biaya penyusutan aktiva tetap; (2) amortisasi aktiva tak berwujud, termasuk amortisasi hak penambangan dan pengusahaan hutan, amortisasi biaya pendirian dan perluasan usaha, dan amortisasi biaya sebelum produksi komersial; (3) pengakuan kerugian piutang; (4) rugi penilaian persediaan; (5) rugi penilaian surat berharga dan investasi saham (Tjahjono, 2005: 523).

2.3.1 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 2000, pengeluaran untuk memperoleh atau nilai perolehan harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaatnya melalui suatu proses penyusutan. Secara lengkap, ketentuan yang berhubungan dengan pengalokasian nilai perolehan harta berwujud atau proses penyusutan harta berwujud diatur

dalam Pasal 11 Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 2000, yang secara garis besar dapat dikemukakan seperti di bawah ini.

a. Penggolongan Harta Berwujud yang Dapat Disusutkan

Secara garis besar, harta berwujud yang dapat disusutkan dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu: (1) harta bukan bangunan, dan (2) bangunan; yang masing-masing masih dikelompokkan lebih lanjut menurut taksiran umur atau masa manfaatnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, pengelompokan harta ke dalam berbagai kategori umur atau masa manfaat tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Sebagai akibatnya, untuk menghitung beban penyusutan atau depresiasi harta berwujud yang sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga dapat diperlakukan atau diakui sebagai biaya fiskal atau pengurang penghasilan, Wajib Pajak harus juga mengelompokkan harta berwujud yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan dalam rangka untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilannya dengan mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan tersebut. Berikut ini pengelompokkan harta berwujud menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia:

Tabel 1
Penggolongan Harta Berwujud

No.	Kelompok Harta	Masa Manfaat
1.	Bukan Bangunan	
	1.1 Kelompok-1	4 tahun
	1.2 Kelompok-2	8 tahun
	1.3 Kelompok-3	16 tahun
	1.4 Kelompok-4	20 tahun
2.	Bangunan	
	2.1 Permanen	20 tahun
	2.2 Tidak permanen	10 tahun

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1), pengelompokan harta ke dalam berbagai kategori masa manfaat tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Sebagai akibatnya, untuk dapat menghitung penyusutan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan Wajib Pajak harus mengelompokkan hartanya dengan mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan tersebut.

b. Dasar Perhitungan, Metode, dan Tarif Penyusutan

Kecuali untuk harta berwujud yang sudah dilakukan penilaian kembali, Undang-Undang Pajak Penghasilan menggunakan harga atau nilai perolehan sebagai satu-satunya basis atau dasar perhitungan penyusutan, hanya memperkenankan metode garis lurus dan metode saldo menurun ganda sebagai dasar penyusutan harta berwujud sebagai biaya fiskal, seperti dinyatakan dalam pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) berikut ini.

“Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besarnya (metode garis lurus-GL) selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun (metode saldo menurun ganda-SMG) selama masa manfaat yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas. Apabila wajib pajak melakukan penilaian kembali harta berdasar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta terkait adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali”. Disamping ketentuan penggolongan berdasar masa manfaat, dasar perhitungan, dan metode penyusutan, Undang-undang Pajak Penghasilan juga menetapkan tarif penyusutan yang berlaku untuk setiap kelompok umur harta, dan menurut masing-masing metode penyusutan terkait seperti tampak pada tabel di bawah ini (Pasal 11 ayat 6). Penyimpangan dari ketentuan tentang penyusutan atas harta berwujud tersebut di atas, hanya berlaku untuk harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam usaha tertentu (Pasal 11 ayat 7).

Tabel 2
Metode dan Tarif Penyusutan Harta Berwujud

Kelompok Harta	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Ayat 1 (GL)	Ayat 2 (SMG)
1. Bukan Bangunan			
1.1 Kelompok 1	4 tahun	25,00%	50,00%
1.2 Kelompok 2	8 tahun	12,50%	25,00%
1.3 Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,50%
1.4 Kelompok 4	20 tahun	5,00%	10,00%
2. Bangunan			
2.1 Bangunan Permanen	20 tahun	5,00%	-
2.2 Bangunan Tidak Permanen	10 tahun	10,00%	-

c. Saat Dimulainya Penyusutan

Dengan beberapa pengecualian, pada dasarnya penyusutan harta berwujud sebagai biaya fiskal dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran untuk mendapatkan harta terkait, seperti diatur dalam pasal 11 ayat 3 dan 4 sebagai berikut : “Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutan dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

2.3.2 Amortisasi Harta Tak Berwujud dan Beban Ditangguhkan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11A (Undang-Undang Pajak Penghasilan), pengeluaran untuk memperoleh atau nilai perolehan harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan harus diamortisasi yang dilakukan secara periodik sebagai berikut (1) dalam bagian-bagian yang sama besar setiap tahun selama masa manfaatnya (metode garis lurus) atau (2) dalam bagian-bagian yang semakin menurun setiap tahun selama masa manfaatnya (metode saldo menurun); yang jumlahnya ditentukan dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran, nilai perolehan, atau nilai sisa buku harta, dan pada akhir masa manfaatnya diamortisasi sekaligus. Untuk menentukan jumlah amortisasi nilai perolehan harta tak berwujud sebagai biaya fiskal, masa manfaat dan tarif amortisasi harta tak berwujud ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3

Penggolongan, Metode dan Tarif Amortisasi Harta Tak Berwujud

No.	Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi Harta Tak Berwujud	
			Garis Lurus	Saldo Menurun
1.	Kelompok-1	4 tahun	25,00%	50,00%
2.	Kelompok-2	8 tahun	12,50%	25,00%
3.	Kelompok-3	16 tahun	6,25%	12,50%
4.	Kelompok-4	20 tahun	5,00%	10,00%

Wajib pajak harus memilih salah satu metode amortisasi dengan tarif yang telah ditetapkan tersebut di atas, serta berdasar masa manfaat harta yang sebenarnya berbeda dari masa manfaat yang telah ditetapkan, maka ketentuan masa manfaat yang terdekat harus digunakan. Sebagai contoh, harta tak berwujud mempunyai masa manfaat yang sebenarnya (kontrak, perjanjian, undang-undang yang berlaku) 5 tahun; Wajib Pajak harus menggunakan ketentuan perhitungan amortisasinya. Demikian pula halnya dengan harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat sebenarnya 7 tahun, harus diamortisasi berdasar ketentuan masa manfaat 8 tahun (tarif 12,50% untuk metode garis lurus, atau tarif 25% untuk metode saldo menurun) sebagai dasar perhitungan amortisasinya. Namun apabila masa manfaat harta yang sebenarnya 6 tahun, maka Wajib Pajak dapat memilih salah satu diantara dua ketentuan masa manfaat yang terdekat, yaitu (1) masa manfaat 4 tahun-tarif 25% untuk metode garis lurus, atau tarif 50% untuk metode saldo menurun; atau (2) masa manfaat 8 tahun tarif 12,50% untuk metode garis lurus atau tarif 25% untuk metode saldo menurun.

Di dalam akuntansi (PSAK No. 19), harta tak berwujud didefinisikan sebagai aktiva non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak berbentuk fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, termasuk hak paten, hak



cipta, hak perusahaan hutan, hak eksplorasi dan eksploitasi sumber alam, waralaba (*franchise*), lisensi, hak pemasaran, piranti lunak komputer, kuota impor, hubungan dengan pemasok atau pelanggan, kesetiaan pelanggan. Tiga kriteria harus dipenuhi oleh sesuatu untuk dapat diakui sebagai harta tak berwujud, yaitu: (1) keteridentifikasian – dapat diidentifikasi secara terpisah dari harta dan/atau kontinuitas usaha perusahaan sebagai suatu entitas, (2) pengendalian – perusahaan memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomis dan membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari harta terkait, dan (3) mempunyai manfaat ekonomis masa depan, termasuk pendapatan dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya.

2.3.3 Pengakuan Kerugian Piutang

Piutang menurut Standar Akuntansi Keuangan dalam penyajiannya harus memenuhi ketentuan berikut *piutang dinyatakan sebesar kotor tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Jumlah kotor piutang harus tetap disajikan pada neraca diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang diragukan atau taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih.*

Dalam perpajakan pembentukan dana cadangan pada dasarnya tidak boleh diakui sebagai biaya kecuali untuk usaha jenis bank dan asuransi. Jadi kerugian karena piutang tak tertagih tidak boleh

ditentukan berdasarkan metode cadangan tetapi harus berdasarkan metode langsung. Dalam metode langsung kerugian karena tidak tertagihnya piutang sebesar piutang yang benar-benar tidak dapat tertagih. Nilai piutang dalam neraca dicantumkan secara neto dalam arti saldo piutang dikurangi dengan piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih lagi. Menurut ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf h UU nomor 17 Tahun 2000, menyatakan bahwa piutang yang dapat diakui sebagai biaya adalah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat (1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan rugi laba komersial (2) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang karena kreditur dan debitur yang bersangkutan, (3) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, dan (4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktur Jenderal Pajak.

Dalam akuntansi komersial dikenal dua macam cara penghapusan piutang yaitu cara langsung (*direct write off*) dan metode cadangan. Umumnya, akuntansi menggunakan metode cadangan. Oleh karena itu rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk mengurangi besarnya biaya kerugian piutang yang telah dibebankan berdasarkan metode cadangan.

2.3.4 Rugi Penilaian Persediaan

Menurut Harnanto (2003), di samping metode harga pokok masuk pertama keluar pertama (MPKP) dan metode harga pokok rata-rata, standar akuntansi keuangan (SAK) juga memperkenankan untuk digunakannya metode harga pokok masuk terakhir keluar pertama (MTKP) sebagai dasar penilaian persediaan dan pengukuran harga pokok barang dijual. Oleh karena perbedaan harga pokok sebagai dasar penilaian persediaan dan pengukuran harga pokok barang dijual bisa berakibat terjadinya perbedaan pada nilai persediaan sebagai aktiva dan harga pokok barang dijual sebagai pengurang penghasilan dalam setiap tahun pajaknya, maka akuntansi persediaan dan harga pokok barang dijual merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perbedaan temporer yang memerlukan akan adanya : (1) beban dan atau kewajiban pajak tangguhan, atau (2) manfaat dan atau aktiva pajak tangguhan. Hal ini terjadi apabila harga pokok persediaan tidak stabil, dan wajib pajak menggunakan metode penilaian persediaan dan pengukuran harga pokok barang dijual yang berbeda untuk tujuan pelaporan keuangan fiskal (misalnya metode harga pokok MPKP atau metode harga pokok rata-rata) dan untuk tujuan akuntansi atau pelaporan keuangan komersialnya (misalnya metode harga pokok MTKP). Perbedaan temporer demikian juga dimungkinkan terjadi karena standar akuntansi keuangan (SAK) memperkenankan persediaan dinilai selain berdasar kos-nya (seperti misalnya: harga terendah antara kos dan harga pasar, nilai realisasi neto).

Berbeda halnya dengan SAK, yang pada dasarnya memberlakukan dua alternatif metode sebagai dasar penilaian persediaan, yaitu (1) kos, dan (2) harga yang terendah antara kos dan harga pasar; Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) memberlakukan hanya satu metode sebagai dasar penilaian persediaan, yaitu kos historis atau nilai perolehan. Tidak diperkenankannya perusahaan untuk menggunakan metode penilaian berdasar harga yang terendah antara kos dan harga pasar membuat akuntansi persediaan juga merupakan salah satu penyebab timbulnya perbedaan temporer atau beda waktu, yang berakibat harus diakui adanya Aktiva dan/atau Kewajiban Pajak, Tanggahan di dalam neraca komersial perusahaan.

Pada industri atau jenis usaha tertentu, setiap unit persediaan dapat diidentifikasi kosnya sejak dari transaksi pembeliannya. Metode demikian disebut metode identifikasi khusus, dan metode ini diperkenankan Undang-undang Pajak penghasilan. Seperti misalnya: *dealer* motor, *dealer* mobil, toko perhiasan tidak mempunyai problem khususnya dalam mengidentifikasi kos setiap unit persediaan sepeda motor, mobil maupun perhiasannya untuk dipakai sebagai dasar perhitungan harga pokok penjualan dan penilaian persediaan. Namun tidak demikian halnya pada kebanyakan industri atau jenis usaha yang lain. Adanya asumsi tentang arus kas persediaan, seperti misalnya : kos masuk pertama keluar pertama (Kos-MPKP), kos rata-rata, kos masuk terakhir keluar pertama (Kos-MTKP) diperlukan untuk dapat menentukan kos per unit yang akan dipakai sebagai dasar perhitungan

harga pokok penjualan dan penilaian persediaan pada akhir tahun pajak. Dengan cara ini, kos diasumsikan masuk dan keluar dari perusahaan dengan sekuen atau urutan tertentu tanpa memperhatikan unit-unit barang secara fisik yang sudah dijual dan barang-barang yang masih ada dalam persediaan.

Dalam hubungannya dengan asumsi arus kas persediaan, Undang-undang Penghasilan hanya memperkenankan asumsi aliran kos masuk pertama keluar pertama (Kos-MPKP), dan kos rata-rata untuk dipakai sebagai dasar perhitungan harga pokok penjualan dan penilaian persediaan. Sedangkan asumsi arus kos terakhir keluar pertama (Kos-MTKP) tidak diperkenankan untuk dipakai sebagai dasar perhitungan harga pokok penjualan penilaian persediaan.

2.3.5 Rugi Penilaian Surat Berharga dan Investasi Saham

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 tahun 1994 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari transaksi penjualan saham di bursa efek, penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham biasa di bursa efek dibebani dengan pajak bersifat final. Sehingga, keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari transaksi saham di bursa efek tidak digabungkan dengan penghasilan lainnya untuk menghitung Pajak Penghasilan yang terutang.

2.4 Rekonsiliasi Fiskal

Wajib Pajak diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan akuntansi pajak atau berdasar laporan komersial yang disesuaikan dengan aturan Undang-undang Perpajakan melalui rekonsiliasi. Laporan keuangan fiskal dapat disusun secara terpisah berdasar Undang-Undang Pajak atau berdasar laporan keuangan komersial yang disusun menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Karena ada perbedaan tujuan antara akuntansi pajak dengan akuntansi komersial, maka laba yang dihasilkan menurut kedua sumber informasi keuangan tersebut juga berbeda. Untuk itu, apabila menggunakan laporan keuangan berdasar akuntansi komersial, diperlukan rekonsiliasi fiskal sehingga pajak yang seharusnya terutang dalam akuntansi sama dengan menurut pajak. Dengan kata lain, rekonsiliasi fiskal dimaksudkan untuk mengubah laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal tanpa harus melalui proses akuntansi tersendiri.

Perbedaan perlakuan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal tidak menyebabkan kewajiban untuk membuat proses akuntansi tersendiri. Laporan keuangan untuk tujuan komersial maupun fiskal cukup diproses dengan satu proses akuntansi yang sama, yaitu berdasarkan akuntansi komersial, sedangkan untuk kepentingan pajak laporan keuangan komersial disesuaikan dengan peraturan Undang-undang pajak untuk menghasilkan laporan fiskal.